

lengkap, dan industri kecil pengolahan kimia dan bahan bangunan serta logam dan elektronik berkembang tanpa sentuhan pembinaan pemerintah.

Dibandingkan dengan kebutuhan pengembangan industri kecil pengolahan di Kota Kupang yang membutuhkan dukungan kemasan/*packaging* yang baik untuk hasil produksi mereka, belum tersentuh oleh Pemerintah Kota Kupang.

Dampak Kebijakan Pemerintah di Kota Kupang

Dampak pada kebijakan pengembangan industri pengolahan yang dilaksanakan di Kota Kupang sebagaimana pada Tabel 6.4.

Tabel 6.4 Kebijakan Pengembangan IK Pengolahan di Kota Kupang Tahun 2005 - 2014

N O	KEBIJAKAN PENGEMBANGAN IK PENGOLAHAN	NIHIL	TER-BATAS	ADA	KET
1.	Perda IKP/Regulasi Lainnya	V			
2.	Perizinan			V	Badan Perizinan Satu Atap Kota Kupang
3.	Unit Pelaksana Teknis/UPT	V			
4.	Sumber Daya Manusia Aparat Pembina IKP		V		Penyuluh Industri ditempatkan di Kelurahan Bukan Pada Disperindag Kota
5.	Kondisi Geografis, Topografis Wilayah			V	
6.	Sumber Daya Alam		V		
7.	Komoditi Unggulan Daerah			V	
8.	Sarana Pendukung (Jalan Raya, Jembatan, Pelabuhan Laut Pelabuhan Udara)			V	Lengkap
9.	Sarana Mobilitas (Transportasi Darat, Laut, Udara)			V	Lengkap
10	Sarana			V	Lengkap

	Perdagangan (Pasar Tradisional, Pasar Modern)				
11.	Sarana Pendukung Keuangan (Perbankan, Lembaga Keuangan Lainnya)			V	Lengkap
12.	Kerjasama Antar Wilayah			V	Dengan Pemkot Surabaya Pemprov Jawa Timur Dan Pemda Kab Prov NTT Lainnya.
13.	Promosi Potensi Daerah (Pameran, Pasar Lelang)			V	Lengkap, Tingkat Kota, Provinsi Dan Pusat
14.	Faktor Lainnya (Koordinasi Antara Stake Holder Pembina Pengembangan IKP)		V		Tidak Semua SKPD Berkoordinasi Dalam Pengembangan IK Pengolahan

Sumber : Hasil Penelitian (diolah)

Kota Kupang sebagai daerah pemberi kontribusi terbesar dari sektor industri pengolahan terhadap PDRB NTT dibandingkan daerah lainnya, masih belum menyiapkan payung hukum pengembangan industri kecil pengolahan yang mampu mendorong lebih cepat pengembangan industri kecil pengolahan karena telah memiliki sebagian besar faktor pendukung percepatan pengembangan industri kecil pengolahan, dengan menyiapkan payung hukum dalam bentuk Perda pengembangan industri, mendirikan Unit Pelaksana Teknis (UPT) industri untuk pembinaan aspek manajemen usaha dan proses produksi juga kemasan dan *labeling*, serta menempatkan aparatur pembina yang tepat, meningkatkan koordinasi antara pelaku pembina pengembangan industri di Kota Kupang.

Kabupaten Kupang

Dampak Pengembangan Industri Kecil Pengolahan di Kabupaten Kupang

Kabupaten Kupang sebagai kabupaten yang dekat dengan Ibu Kota Provinsi NTT dan memiliki luasan wilayah yang besar dan

200

memiliki potensi untuk dimekarkan dengan 24 kecamatan menampilkan profil sebagai pusat suplai bahan baku industri dan potensi ternak serta hasil perikanan dan kelautan, namun industri kecil umumnya kurang berkembang dibandingkan dengan kabupaten lainnya di NTT. Sesuai objek penelitian yaitu pada industri kecil pengolahan, maka lokasi penelitian yang diambil adalah pada Kecamatan Kupang Timur dan Kupang Tengah.

Di Kecamatan Kupang Timur dan Kupang Tengah terdapat perusahaan/usaha kecil pengolahan yang menghasilkan jenis komoditi dari industri pengolahan pangan, tekstil, kerajinan dan kimia bahan bangunan serta logam dan elektronik.

Data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kupang, memberikan gambaran data capaian hasil sektor ini yang masih relatif rendah yaitu berkisar antara 1 % s/d hampir 2 % terhadap PDRB Kabupaten Kupang, kondisi yang sama dialami pemerintah provinsi.

Pembinaan terhadap industri kecil pengolahan di Kabupaten Kupang berdampak terhadap pengembangan industri kecil pengolahan seperti pada Tabel 6.5.

Tabel 6.5. Dampak Pembinaan Terhadap Indusri Kecil Pengolahan di Kabupaten Kupang Tahun 2005 – 2014

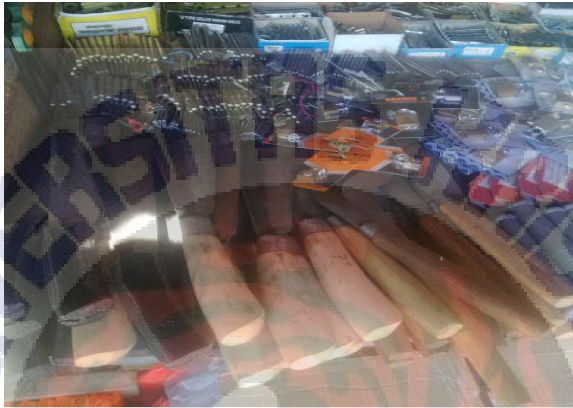
NO	ASPEK PENGEMBANGAN USAHA	IKP PANGAN	IKP SANDANG	IKP KERAJINAN	IKP KIMIA & BB	IKP LOGAM & ELTRNK
1.	Pemasaran	-	V	V	-	-
2.	Produksi	-	V	-	-	V
3.	Organisasi & Managemen	-	V	-	-	-
4.	Keuangan	-	V	V	-	-

Sumber : Hasil Penelitian diolah

Data tersebut di atas menampilkan fokus pembinaan pemerintah Kota Kupang pada industri kecil pengolahan sandang yaitu tenun ikat yang mendapat paket lengkap pembinaan dan industri kecil pengolahan kerajinan yaitu alat musik tradisional *Sasando* yang mendapat sebagian paket, sementara industri kecil logam dan elektronik hanya mendapat satu paket yaitu bantuan mesin peralatan untuk peningkatan kegiatan

produksi. Dampak bantuan mesin peralatan terhadap industri kecil pengolahan logam adalah tersedianya aneka barang dari logam sebagai peralatan rumah tangga seperti pada Gambar 6.3.

Gambar 6.3 Aneka Peralatan Rumah Tangga Produksi IK Logam di Kabupaten Kupang.



Untuk industri kecil pengolahan kimia dan bahan bangunan serta pangan berkembang tanpa sentuhan pembinaan pemerintah. Dibandingkan dengan kebutuhan pengembangan industri kecil pengolahan di Kabupaten Kupang yang membutuhkan dukungan pemerintah untuk mengolah sumber daya alam yaitu daerah pantai yang berpotensi untuk pembangunan industri garam dan pengembangan dari garam rakyat ke garam beryodium serta potensi ternak terutama sapi dengan membangun pabrik pengolahan daging, sudah dirintis oleh Pemerintah Provinsi NTT, dengan lokasi di Sulamu dan Oebelo serta Noelbaki namun belum secara baik ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Kupang.

Dampak Kebijakan Pengembangan Industri Kecil di Kabupaten Kupang

Dampak pada kebijakan pengembangan industri pengolahan yang dilaksanakan di Kabupaten Kupang sebagaimana pada Tabel 6.6.

Tabel 6.6 Kebijakan Pengembangan IK Pengolahan di Kabupaten Kupang
Tahun 2005 - 2014

N O	KEBIJAKAN PENGEMBANGAN IK PENGOLAHAN	NIHIL	TERBATAS	ADA	KET
1.	Perda IKP/Regulasi Lainnya	V			
2.	Perizinan		V		Dilakukan oleh Masing-Masing SKPD Pembina
3.	Unit Pelaksana Teknis/UPT	V			
4.	Sumber Daya Manusia Aparat Pembina IKP		V		Penyuluh Industri Ditempatkan di SKPD Lain Bukan pada Disperindag Kab Kupang
5.	Kondisi Geografis, Topografis Wilayah			V	Sangat Mendukung
6.	Sumber Daya Alam			V	Melimpah
7.	Komoditi Unggulan Daerah		V		Namun Berbeda dalam Fokus Pembinaan oleh SKPD Terkait
8.	Sarana Pendukung (Jalan Raya, Jembatan, Pelabuhan Laut, Pelabuhan Udara)		V		Jalan Raya Beragam Kondisi, Jembatan Menghubungi Daerah Produksi Tidak Lengkap, (Banyak Sungai Tidak Memiliki Jembatan) Pelabuhan Melalui Wilayah Kota Kupang
9.	Sarana Mobilitas (Transportasi Darat, Laut, Udara)		V		Trayek Transportasi Darat Terbatas.
10.	Sarana Perdagangan (Pasar Tradisional, Pasar Modern)		V		Belum Ada Pasar Modern
11.	Sarana Pendukung Keuangan (Perbankan, Lembaga Keuangan Lainnya)		V		Belum Semua Bank Ada Pada Wilayah Ini
12.	Kerjasama Antar Wilayah		V		Dengan Pemerintah Daerah Dlm Prov Ntt
13.	Promosi Potensi Daerah (Pameran, Pasar Lelang)			V	Lengkap, Tingkat Kota, Provinsi dan Pusat

14.	Faktor Lainnya (Koordinasi Stake Pembina Pengembangan Ikp)	Lainnya Antara Holder	V	-		Hanya Ada dalam Rapat yang di Pimpin Kepala Daerah, Aplikasinya Setiap Skpd Berjalan Sendiri dalam Pelaksanaan Programnya.
-----	--	-----------------------	---	---	--	--

Sumber : Hasil Penelitian (di olah)

Kabupaten Kupang sebagai daerah pemberi kontribusi terbesar kedua dari sektor industri pengolahan terhadap PDRB NTT dibandingkan daerah lainnya, masih belum menyiapkan payung hukum pengembangan industri kecil, pemerintah sebaiknya menyiapkan payung hukum dalam bentuk Perda pengembangan industri, mendirikan Unit Pelaksana Teknis (UPT) industri untuk pembinaan aspek manajemen usaha dan proses produksi, juga kemasan dan *labeling*, serta menempatkan aparatur pembina yang tepat.

Sarana prasana merupakan hal penting yang mendukung percepatan upaya pengembangan industri kecil pengolahan yaitu, jalan yang baik dengan jembatan yang menghubungkan daerah produksi, pelabuhan laut bisa dibangun di daerah Sulamu untuk memudahkan akses pengiriman komoditi industri ke luar daerah, dan sarana perbankan, sarana perdagangan serta yang penting juga adalah meningkatkan koordinasi antara pelaku pembina pengembangan industri di Kabupaten Kupang.

Kabupaten Timor Tengah Selatan

Dampak Pengembangan Industri Kecil Pengolahan

Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagai kabupaten yang memiliki posisi di tengah Pulau Timor memiliki jumlah kecamatan yang terbesar dari kabupaten obyek penelitian lain yaitu 32 kecamatan. Untuk masa yang akan datang dapat dipertimbangkan untuk dimekarkan dalam beberapa kabupaten untuk pendekatan pelayanan di Provinsi NTT menampilkan profil sebagai pusat suplai bahan baku hasil kehutanan dan hasil peternakan, namun industri

kecil sangat kurang berkembang dibandingkan kabupaten lainnya di daerah ini.

Sesuai objek penelitian yaitu pada industri kecil pengolahan, maka lokasi penelitian yang diambil adalah pada Kecamatan Kota Soe. Di Kecamatan Kota Soe terdapat perusahaan/usaha kecil pengolahan yang menghasilkan jenis komoditi dari industri pengolahan pangan, tekstil, kerajinan dan kimia bahan bangunan serta logam dan elektronik. Salah satunya Eddy Puay Tantry yang menghasilkan aneka kerajinan patung dari kayu yang bermotif khas Timor yang menarik minat para kolektor mancanegara (sesuai wawancara penulis dengan Ibu Tantry).

Badan Pusat Statistik Kabupaten Timor Tengah Selatan memberikan data-data capaian hasil sektor ini yang masih relatif sangat rendah yaitu sebesar 0,63% s/d 0, 65%, dan tetap statis pada posisi tersebut terhadap PDRB daerah.

Salah satu industri pengolahan logam dan elektronik bengkel di Kota Soe adalah milik Bapak Yerry Yapi yang penulis wawancarai untuk mengetahui usahanya. Umumnya pembinaan terhadap industri kecil pengolahan di Kabupaten Timor Tengah Selatan berdampak terhadap pengembangan industri kecil pengolahan seperti tersebut pada Tabel 6.7.

Tabel 6.7. Dampak Pembinaan Terhadap Industri Kecil Pengolahan di Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2005-2014

NO	ASPEK PENGEMBANGAN USAHA	IKP PANGAN	IKP SANDANG	IKP KERAJINAN	IKP KIMIA & BB	IKP LOGAM & ELTRNK
1.	PEMASARAN	V	V	V	-	-
2.	PRODUKSI	V	V	-	-	-
3.	ORGANISASI & MANAGEMEN	V	V	-	-	-
4.	KEUANGAN	V	V	-	-	-

Sumber : Hasil Penelitian diolah

Data tersebut di atas menampilkan fokus pembinaan pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan pada industri kecil pengolahan pangan dan industri kecil pengolahan pangan dan industri kecil sandang yaitu tenun ikat yang mendapat paket lengkap sementara industri kecil pengolahan kerajinan tidak lengkap, dan industri kecil pengolahan kimia dan bahan bangunan serta logam dan elektronik berkembang tanpa sentuhan pembinaan pemerintah.

Dibandingkan dengan kebutuhan pengembangan industri kecil pengolahan di Kabupaten Timor Tengah Selatan yang membutuhkan dukungan penuh untuk pengembangan industri pangan didukung sumber daya alam dan komoditi unggulan daerah seperti jeruk keprok soe dan apel soe yang menjadi icon Provinsi NTT pada tingkat nasional belum diperhatikan secara optimal. Komoditi hasil kehutanan yang memiliki kualitas unggulan yaitu biji asam jawa yang dapat diolah sebagai tepung biji asam jawa dan sudah tersedia sarana pengolahan dalam bentuk pabrik mini namun belum dioptimalkan bahkan sudah tidak berfungsi, tepung biji asam jawa penting sebagai bahan penolong dalam industri benang yang berfungsi sebagai pengikat warna pada benang, dan selama ini pabrik benang mengimpornya dari luar negeri. Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan dapat meningkatkan sektor industri pengolahan antara lain dengan komoditi tersebut.

Dampak Kebijakan Pengembangan Industri Kecil di Kabupaten Timor Tengah Selatan

Dampak pada kebijakan pengembangan industri pengolahan yang dilaksanakan di Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagaimana pada Tabel 6.8.

Tabel 6.8 Kebijakan Pengembangan IK Pengolahan di Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2005-2014

NO	KEBIJAKAN PENGEMBANGAN IK PENGOLAHAN	NIHIL	TERBATAS	ADA	KET
1.	Perda IKP/Regulasi Lainnya	V			
2.	Perizinan		V		Dilakukan Oleh Masing-Masing SKPD Pembina
3.	Unit Pelaksana Teknis/UPT		V		Upt Marmor Namun Tidak Berfungsi Lagi
4.	Sumber Daya Manusia Aparat Pembina IKP		V		Penyuluh Industri Di Tempatkan Di Skpd Lain Bukan Pd Disperindag Kab Timor Tengah Selatan
5.	Kondisi Geografis, Topografis Wilayah			V	Sangat Mendukung
6.	Sumber Daya Alam			V	Melimpah
7.	Komoditi Unggulan Daerah		V		Namun Berbeda Dalam Fokus Pembinaan Oleh Skpd Terkait
8.	Sarana Pendukung (Jalan Raya, Jembatan, Laut, Pelabuhan Udara)		V		Jalan Raya Beragam Kondisi, Jembatan Menghubungi Daerah Produksi Tidak Lengkap, Pelabuhan Melalui Wilayah Kota Kupang Atau Kab.Ttu Dan Kab Belu
9.	Sarana Mobilitas (Transportasi Darat, Laut, Udara)		V		Trayek Transportasi Darat Terbatas.
10	Sarana Perdagangan (Pasar Tradisional, Pasar Modern)		V		Belum Ada Pasar Modern
11.	Sarana Pendukung Keuangan(Perbankan, Lembaga Keuangan Lainnya)		V		Belum Semua Bank Ada Pada Wilayah Ini
12.	Kerjasama Antar		V		Dengan

	Wilayah				Pemerintah Daerah Dlm Prov Ntt
13.	Promosi Potensi Daerah (Pameran, Pasar Lelang)			V	Lengkap, Tingkat Kota, Provinsi Dan Pusat
14.	Faktor Lainnya (Koordinasi Antara Stake Holder Pembina Pengembangan Ikp)	V			Hanya Ada Dalam Rapat Yang Di Pimpin Kepala Daerah, Aplikasinya Setiap Skpd Melakukan Kegiatannya Sendiri.

Sumber : Hasil Penelitian (di olah)

Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagai daerah pemberi kontribusi terbesar ketiga dari sektor industri pengolahan terhadap PDRB NTT dibandingkan daerah lainnya, masih belum menyiapkan payung hukum pengembangan industri kecil, pemerintah sebaiknya menyiapkan payung hukum dalam bentuk Perda pengembangan industri, mendirikan Unit Pelaksana Teknis (UPT) industri yang tepat sesuai kondisi daerah dan UPT yang bersifat umum untuk pembinaan aspek manajemen usaha dan proses produksi juga kemasan dan *labeling*, serta menempatkan aparatur pembina yang tepat. Salah satu hasil pembinaan IK Pangan seperti nampak pada Gambar 6.4.

Gambar 6.4 Keripik Pisang Produksi IK Pangan Kabupaten TTS



Sarana prasana merupakan hal penting yang mendukung percepatan upaya pengembangan industri kecil pengolahan yaitu, jalan yang baik dengan jembatan yang menghubungkan daerah produksi, pelabuhan laut saat ini sedang dibangun di daerah Kolbano untuk memudahkan akses pengiriman komoditi industri ke luar daerah, dan sarana perbankan, sarana perdagangan serta yang penting juga adalah meningkatkan koordinasi antara pelaku pembina pengembangan industri di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Kestabilan kondisi ini mendukung berkembangnya upaya-upaya melakukan pembinaan untuk pengembangan industri pengolahan. Salah satunya Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan melalui Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda TTS) yang diketuai oleh Ibu Bupati melakukan terobosan yaitu bekerja sama dengan pihak perguruan tinggi untuk menghasilkan berbagai produk olahan pangan yang didukung bahan baku asli daerah tersebut seperti pisang, ubi, kelapa, susu sapi, dan kacang tanah, seperti yang dijelaskan oleh Ibu Ir. Rambu Atanau Mella di tempat promosi aneka produk industri pengolahan pangan di Soe.

Kabupaten Timor Tengah Utara

Dampak Pengembangan Industri Kecil Pengolahan

Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai salah satu kabupaten di Provinsi NTT menampilkan profil sebagai pusat suplai bahan baku industri hasil hutan dan pertambangan untuk industri kecil juga kurang berkembang seperti kabupaten lainnya di daerah ini. Hal ini ditegaskan dengan posisi keduabelas daerah yang memberi kontribusi pada PDRB Provinsi NTT, jauh di bawah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten TTS. Sesuai objek penelitian yaitu pada industri kecil pengolahan, maka lokasi penelitian yang diambil adalah pada Kecamatan Kota Kefamenanu.

Di Kecamatan Kota Kefemenanu terdapat perusahaan/usaha kecil yang menghasilkan berbagai jenis komoditi dari industri

pengolahan pangan, tekstil, kerajinan dan kimia bahan bangunan serta logam dan elektronik.

Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Timor Tengah Utara menunjukkan capaian hasil sektor ini masih relatif rendah yaitu antara 1% s/d 1,5 %, masih jauh berada di bawah kontribusi pada level provinsi.

Salah satu industri pengolahan yang maju dan sudah melakukan pemasaran ke luar negeri adalah industri kerajinan sandang tenun ikat “Biboki” di bawah naungan Yayasan”Tafean Pah” yang dipimpin oleh Ibu Maria Yovita Meta Bastian, seperti nampak pada Gambar 6.5 di bawah ini:

Gambar 6.5 “ Biboki “ Art Shop di Kabupaten TTU



Dari pengamatan awal di 4 kabupaten/kota, data jumlah unit usaha baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota berbeda jauh dengan kondisi real di lapangan, keberadaan unit usaha yang aktif hanya maksimal 20 % s/d 30 % dari data yang ada.

Data sekunder menyebutkan tidak ada skala industri kecil di Kabupaten TTU, yang ada hanya industri kecil skala mikro atau rumah tangga, seperti prediksi penulis dari awal bahwa kurang lebih 95% unit usaha formal yang terdata ternyata masih masuk dalam klasifikasi industri nonformal (industri rumah tangga) dan banyak industri nonformal yang belum terdata tetapi tetap aktif memproduksi dan

memasarkannya. Salah satu industri yang terdata adalah industri pengolahan kerajinan batu akik dari Desa Nian, milik Bapak Agustinus Lake.

Secara umum pembinaan terhadap industri kecil pengolahan di Kabupaten Timor Tengah Utara berdampak terhadap pengembangan industri kecil pengolahan seperti pada Tabel 6.9.

Tabel 6.9 Dampak Pembinaan Terhadap Industri Kecil Pengolahan di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2005 – 2014

N O	ASPEK PENGEMBANGAN USAHA	IKP PANG AN	IKP SAN DANG	IKP KERA JINAN	IKP KIMIA & BB	IKP LOGAM & ELTRNK
1.	Pemasaran	V	V	V	-	-
2.	Produksi	-	V	V	-	-
3.	Organisasi & Managemen	-	V	-	-	-
4.	Keuangan	-	V	V	-	-

Sumber : Hasil Penelitian diolah

Data tersebut di atas menampilkan fokus pembinaan pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara berada pada industri kecil pengolahan sandang yaitu tenun ikat yang mendapat paket lengkap dan industri kecil pengolahan kerajinan yaitu batu akik kecuali pembinaan tentang organisasi dan manajemen, sementara industri kecil pengolahan pangan tidak lengkap, dan industri kecil pengolahan kimia dan bahan bangunan serta logam dan elektronik berkembang tanpa sentuhan pembinaan pemerintah.

Kebutuhan pengembangan industri kecil pengolahan kerajinan yaitu batu akik dan batu hias di Kabupaten Timor Tengah Utara dan industri pengolahan hasil ternak yang menjadi potensi daerah belum ditangani secara baik, terlihat dari bantuan mesin produksi yang terbengkalai dan pengiriman ternak hidup yang diantarpulaukan keluar dalam jumlah yang besar. Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara sebaiknya melihat komoditi yang nilai tambahnya tinggi untuk kesejahteraan masyarakatnya.

Dampak Kebijakan Pengembangan (Industri Kecil) di Kabupaten Timor Tengah Utara

Dampak pada kebijakan pengembangan industri pengolahan yang dilaksanakan di Kabupaten Timor Tengah Utara sebagaimana nampak pada Tabel 6.10 di bawah ini:

Tabel 6.10 Kebijakan Pengembangan IK Pengolahan di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2005 - 2014

NO	KEBIJAKAN PENGEMBANGAN IK PENGOLAHAN	NIHIL	TERBAHAS	ADA	KET
1.	Perda IKP/Regulasi Lainnya	V			
2.	Perizinan		V		Dilakukan Oleh Masing-Masing SKPD Pembina
3.	Unit Pelaksana Teknis/UPT	-			
4.	Sumber Daya Manusia Aparat Pembina IKP		V		Penyuluh Industri Di Tempatkan di SKPD Lain Bukan pada Disperindag Kab Timor Tengah Utara
5.	Kondisi Geografis, Topografis Wilayah			V	Sangat Mendukung
6.	Sumber Daya Alam			V	Melimpah
7.	Komoditi Unggulan Daerah		V		Namun Berbeda Dalam Fokus Pembinaan Oleh Skpd Terkait
8.	Sarana Pendukung (Jalan Raya, Jembatan, Pelabuhan Laut, Pelabuhan Udara)		V		Jalan Raya Beragam Kondisi, Jembatan Menghubungi Daerah Produksi Tidak Lengkap, Pelabuhan Selain Wini Di Kab Ttu Jg Melalui Wilayah Kota Kupang, Kab Belu Terutama Pelabuhan Udara
9.	Sarana Mobilitas (Transportasi Darat, Laut, Udara)		V		Trayek Transportasi Darat Terbatas.
10	Sarana Perdagangan		V		Belum Ada Pasar

Dampak Pembinaan terhadap Perkembangan Industri Kecil Pengolahan

	(Pasar Tradisional, Pasar Modern)				Modern
11.	Sarana Pendukung Keuangan (Perbankan, Lembaga Keuangan Lainnya)		V		Belum Semua Bank Ada Pada Wilayah Ini
12.	Kerjasama Antar Wilayah		V		Dengan Pemerintah Daerah Dlm Prov Ntt
13.	Promosi Potensi Daerah (Pameran, Pasar Lelang)			V	Lengkap, Tingkat Kota, Provinsi Dan Pusat
14.	Faktor Lainnya (Koordinasi Antara Stake Holder Pembina Pengembangan Ikp)	V			Hanya Ada Dalam Rapat Yang Di Pimpin Kepala Daerah, Aplikasinya Nihil

Sumber : Hasil Penelitian (di olah)

Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai daerah pemberi kontribusi urutan duabelas dari sektor industri pengolahan terhadap PDRB NTT dibandingkan daerah lainnya, masih belum menyiapkan payung hukum pengembangan industri kecil, oleh karena itu pemerintah sebaiknya menyiapkan payung hukum dalam bentuk Perda pengembangan industri, mendirikan Unit Pelaksana Teknis (UPT) industri yang tepat sesuai kondisi daerah dan UPT yang bersifat umum untuk pembinaan aspek manajemen usaha dan proses produksi, juga kemasan dan *labeling*, serta menempatkan aparatur pembina yang tepat.

Sarana prasana merupakan hal penting dalam mendukung percepatan upaya pengembangan industri kecil pengolahan yaitu jalan yang baik dengan jembatan yang menghubungkan daerah produksi, pelabuhan laut saat ini yaitu Wini agar ditingkatkan kapasitasnya untuk memudahkan akses pengiriman komoditi industri ke luar daerah, sekaligus mengurangi biaya tinggi dalam proses pengiriman. Begitu juga sarana perbankan, sarana perdagangan serta yang penting juga adalah meningkatkan koordinasi antara pelaku pembina pengembangan industri di Kabupaten Timor Tengah Utara.